

Toleransi Beragama di Kabupaten Poso

Ahsanul Khalikin

Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Balitbang dan Diklat Kemenag RI,
Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

ahsan1901.as@gmail.com

Diterima 18 Oktober, diseleksi 19 Oktober, dan direvisi 24 Oktober 2016

Abstract

This paper describes the dynamics of religious life in the aftermath of religious conflict in Poso. The findings show that Poso is inevitably a plural society both ethnicity and religion. The relationship between families and interreligious marriage have been in practice since in the old times and there is no problem with that. Prior to the Poso conflict occurring in 1998, 2000 and 2001 respectively, Poso city was a predominantly Muslim area. While the Christian people reside in the highland areas. This religious topography changed dramatically in the post Poso conflict. In the past, Poso people lived harmoniously and respected the outsiders very well. This research used qualitative approach and case study as its method. Data collection includes interviews and observation. The conclusion is that, religious tolerance among Poso people prior to the conflict was based on Sintuwu Maroso. The meaning of this philosophy is twofold: sintuwu means to unite or unity, and maroso means being strong. Therefore, the two words mean 'a strong unity'. Poso people are always pleased to live peacefully and the old philosophy is often instrumental to solve conflict in the society.

Keywords: Tolerance, Religion, Prone Regions, Conflict, Poso Regency.

Abstrak

Paper ini mempermasalahkan dinamika kondisi kehidupan beragama di Poso pasca konflik keagamaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Poso terdiri dari beragam suku dan agama. Sejak dahulu di Poso pertalian keluarga, kawin antar agama sudah terjadi dan tidak menjadi masalah. Sebelum konflik Poso terjadi tahun 1998, 2000, dan 2001, kota Poso didominasi pemeluk Islam. Sedangkan di wilayah pegunungan seperti Tentena, pemeluk Kristen adalah dominan. Kondisi keagamaan ini menjadi berbalik ketika konflik terjadi. Sebenarnya dahulu penerimaan masyarakat Poso terhadap orang luar sangat baik. Penelitian ini bersifat kualitatif, sedangkan metodenya adalah studi kasus. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan. Kesimpulannya, toleransi beragama masyarakat Poso sendiri sebelum konflik berlandaskan pada falsafah Sintuwu Maroso. Falsafah ini mengandung dua makna, yaitu Sintuwu yang berarti bersatu atau persatuan, sedangkan maroso berarti kuat. Apabila digabungkan berarti persatuan yang kuat. Masyarakat Poso selalu ingin hidup damai dan falsafah itu yang selalu diangkat untuk mendamaikan masyarakat bila terjadi konflik.

Kata kunci: Toleransi, Beragama, Daerah Rawan, Konflik, Kabupaten Poso.

Pendahuluan

Manakala budaya toleransi tidak berkembang di kalangan umat beragama, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik sosial, termasuk konflik sosial bernuansa agama (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 1). Hal ini pernah di alami masyarakat Poso di awal era reformasi bangsa Indonesia, di mana toleransi umat beragama dulu sudah menjadi bagian hidup mereka sehari-hari. Bahkan, sebuah kultur budaya toleransi beragama yang sangat kuat bisa berubah menjadi tragedi konflik yang cukup berkepanjangan.

Masyarakat Poso terdiri dari beragam suku dan agama. Sejak dahulu di Poso pertalian keluarga, kawin antar agama banyak terjadi dan tidak masalah. Bahkan, ada hal yang menarik sebelum konflik Poso (1998), dahulu penerimaan masyarakat Poso terhadap orang luar biasa baiknya. Gambaran awal tadi bisa disimpulkan bagaimana toleransi beragama bisa terjadi dengan baik, baik sebelum konflik sejak 1998-2004 hingga pasca konflik sekarang ini. Contoh yang kongkrit di kota Poso dominan pemeluknya beragama Islam, sedangkan di wilayah pegunungan seperti Tentena dominan pemeluknya beragama Kristen, kemudian menjadi hancur ketika terjadi konflik (1998).

Menyadari kondisi di atas, maka pengembangan budaya toleransi di kalangan umat beragama merupakan hal yang urgen dan menjadi dambaan bagi kalangan umat beragama demi terciptanya kehidupan harmonis di kalangan mereka (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 2).

Di daerah-daerah yang cenderung rawan konflik sosial bernuansa agama, kehidupan keagamaan yang dihiasi sikap toleran di kalangan masyarakat yang

berbeda agama menjadi penting dan sangat diperlukan. Terlebih sikap toleran tersebut terdapat di kalangan masyarakat berbeda agama di daerah rawan konflik, sikap toleran terhadap aspek atau faktor-faktor keagamaan tertentu yang dilakukan seseorang maupun kelompok orang terhadap umat beragama lain di daerah rawan konflik dapat ditingkatkan dan dikembangkan untuk menangkali kemungkinan timbulnya konflik serupa pada masa mendatang, sehingga daerah yang semula dikategorikan sebagai "rawan konflik" diharapkan tingkat kerawanannya berkurang. Sebaliknya, jika sikap intoleransi berkembang di suatu daerah, maka dapat menjadi faktor pemicu yang akan mendorong daerah rawan konflik menjadi daerah konflik (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 4).

Masalah inti penelitian ini adalah "Bagaimana Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik Terjadi?". Secara rinci, ada beberapa pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban, yaitu: *Pertama*, bagaimana umat beragama memaknai toleransi beragama? *Kedua*, apa saja bentuk-bentuk toleransi beragama yang terjalin di kalangan tokoh agama? *Ketiga*, faktor apa saja yang menjadi penyebab terbangunnya toleransi beragama? *Keempat*, kasus-kasus konflik apa saja yang pernah terjadi dan apa faktor penyebabnya? *Kelima*, apa hal-hal yang disukai dan yang tidak disukai kelompok umat beragama satu terhadap umat beragama yang lain? *Keenam*, apa yang menjadi sumber toleransi maupun intoleransi? *Ketujuh*, upaya apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan toleransi beragama di kalangan umat beragama?

Penelusuran atas pertanyaan itu setidaknya dapat diketahui beberapa hal: (i) Pemaknaan toleransi beragama oleh umat beragama; (ii) Bentuk-bentuk toleransi beragama yang terjalin di kalangan umat beragama; (iii) Faktor-

faktor yang menyebabkan terbangunnya toleransi beragama di kalangan umat beragama; (iv) Kasus-kasus konflik yang pernah terjadi dan faktor penyebabnya; (v) Hal-hal yang disukai atau tidak disukai kelompok umat beragama satu terhadap kelompok umat beragama yang lain; (vi) Sumber toleransi dan intoleransi; (vii) Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan toleransi beragama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan bentuk penelitiannya studi kasus dengan jenis eksploratif. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara mendalam, studi pustaka dan dokumentasi, serta pengamatan.

Informan terdiri dari unsur para aktor, pendorong maupun penghambat toleransi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh lintas agama yang pro maupun yang kontra toleransi dan pihak lainnya yang dianggap mengetahui.

Ada beberapa penelitian tentang toleransi yang telah dilakukan, antara lain: 1) Anis Faranita Dhanik Rachmawati (2006) yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi terdapatnya toleransi antara umat Islam dengan umat Katolik di Dukuh Kasaran Desa Pasungan, Klaten; 2) Fathurrahman (2008) yang mengkaji toleransi beragama di antara penyedia kos-kosan dan pengguna jasa kos-kosan beda agama di Dusun Papringan Desa Catur Tunggal, Sleman. Penelitiannya menghasilkan temuan bahwa karena pengaruh budaya "ewuh pakewuh", maka terbangun toleransi beragama di kalangan penyedia dan pengguna jasa kos-kosan di lokasi penelitian; 3) Lembaga Survey Indonesia (LSI) pada tahun 2006 yang melakukan survey opini publik tentang toleransi sosial masyarakat Indonesia, yang mengkaji antara lain tentang hidup bertetangga dengan lain etnis, dengan lain agama, serta bagaimana

menyikapi pembangunan rumah ibadah yang didirikan umat lain (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 8).

Tulisan hasil penelitian pada bulan Maret 2015 di Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah ini merupakan salah satu tulisan dari penelitian *Toleransi Umat Beragama di Daerah Rawan Konflik di Berbagai Daerah* yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.

Penjelasan Konsep

1. Dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Toleransi *UNESCO* dinyatakan bahwa toleransi adalah rasa hormat, penerimaan, dan penghargaan atas keragaman budaya dunia yang kaya, berbagai bentuk ekspresi diri, dan cara-cara menjadi manusia. Toleransi adalah kerukunan dalam perbedaan;
2. Sullivan, Peirson dan Marcus, sebagaimana dikutip Saiful Mujani, menjelaskan toleransi didefinisikan sebagai *a willingness to put up with those things one rejects or opposes*, yakni "kesediaan untuk menghargai, menerima, atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditantang oleh seseorang" (Saiful Mujani, 2007: 162);
3. Suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, di mana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. (<https://ultimatesammy.wordpress.com/2013/03/23> pengertian sikap dan perilaku toleran);
4. Benyamin Intan dalam bukunya *"Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia"*, mengutip David Little, membagi pengertian toleransi

dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, dalam devinisinya yang minimal yaitu jawaban pada seperangkat kepercayaan, praktik atau atribut yang pada awalnya dianggap sebagai menyimpang atau tidak bisa diterima, dengan ketidaksetujuan, tetapi tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan; *Kedua*, dalam bentuknya yang paling kuat, toleransi dapat didefinisikan sebagai sebuah jawaban kepada seperangkat kepercayaan, praktik atau atribut yang awalnya dianggap sebagai menyimpang atau tidak bisa diterima, dengan ketidaksetujuan yang disublimasi, tetapi tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan. Dengan demikian, sikap toleran bukan hanya membutuhkan kesadaran, tetapi juga semangat, gairah, perjuangan dalam bersikap demi hidup bersama yang lebih baik, www.commongroundnews.org, (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 9-10);

Berdasarkan beberapa batasan di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud "toleransi" dalam penelitian ini adalah kesediaan menghargai, menghormati, dan menerima keberadaan umat beragama lain yang diaktualkan dalam sikap dan perilaku, baik perorangan maupun kelompok orang, tanpa ada paksaan. Dengan sikap maupun perilaku tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang rukun dan damai demi hidup bersama yang lebih baik di antara umat yang berbeda agama di suatu daerah (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 10).

Toleransi beragama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah toleransi antarumat beragama, yaitu sikap maupun perilaku terhadap hal-hal yang bersifat keagamaan yang meliputi: keyakinan, pemikiran maupun perilaku keagamaan umat beragama yang mencerminkan toleransi terhadap umat beragama lain,

baik perorangan maupun kelompok. Daerah rawan konflik yaitu daerah yang masyarakatnya memiliki emosionalitas dan sensitivitas tinggi di bidang sosial dan agama, sehingga rentan terhadap timbulnya konflik sosial bernuansa agama (Tim Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016: 12).

Data yang dihimpun meliputi: (i) Gambaran umum lokasi penelitian yang mencakup tentang kondisi geografis, demografis, pendidikan, dan kehidupan keagamaan; (ii) Pemahaman masyarakat tentang toleransi beragama, sikap dan perilaku mereka tentang perbedaan agama yang ada di daerahnya; (iii) Toleransi beragama dan bentuknya yang mencakup sikap dan perilaku terhadap orang atau kelompok orang yang beragama lain terkait butir-butir faktor keagamaan.

Untuk mengungkap toleransi beragama, mula-mula ditelusuri tentang sikap umat beragama dalam memahami perbedaan yang ada di lingkungannya, termasuk bagaimana mereka memaknai toleransi itu sendiri. Dalam menelusuri sikap serta pemahaman mereka terhadap perbedaan, dilihat mulai dari tahu-tidaknya mereka tentang adanya perbedaan di lingkungannya, ada tidaknya komunikasi antarumat berbeda agama, hingga kemungkinan kerjasama yang dilakukan dengan kelompok umat lain.

Selain itu, ditelusuri pula tentang landasan atau dasar mereka bersikap dan berperilaku terhadap orang, kelompok orang atau umat berbeda agama, yang meliputi nilai-nilai agama, aturan hukum, perundang-undangan yang ada, nilai budaya, kearifan lokal dan kesepakatan sosial. Selanjutnya, diungkap tentang kemungkinan adanya kerjasama berikut bentuk-bentuk kerjasama yang mereka bangun, di bidang apa saja, misalnya bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, termasuk olahraga dan seni.

Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur, sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Dilihat dari posisinya permukaan bumi letak wilayahnya secara umum terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Kawasan lainnya terletak pada pesisir pantai yang sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Luas daratannya, setelah terpisah dengan Kabupaten Tojo Una-una, diperkirakan sekitar 8.712,25 km² atau 12,81% dari luas daratan Propinsi Sulawesi Tengah.

Kawasan pantai, pegunungan dan perbukitan merupakan batas administratif wilayah Kabupaten Poso, sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Provinsi Sulawesi Utara, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una dan Kabupaten Morowali, sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 209.228 jiwa, dengan penduduk laki-laki berjumlah 108.747 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 100.481 jiwa. Kota Poso sendiri berpenduduk mayoritas Muslim, sedangkan Kecamatan Tentena memiliki penduduk mayoritas Kristen. Meski sebelum konflik kedua wilayah tersebut komposisinya relatif beragam, tetapi saat ini keduanya hampir secara keseluruhan terpisah berdasarkan perbedaan agama.

2. Kehidupan Keagamaan

Gambaran pemeluk agama Kabupaten Poso pada tahun 2010 adalah:

Islam 39,61%, Kristen 53,70%, Katolik 0,60%, Hindu 6,07%, Buddha 0,01%. Sedangkan tempat ibadah masing-masing agama tercatat masjid 114 buah, mushalla 67 buah, Gereja Kristen 456 buah, Gereja Katolik 17 buah, dan Pura 11 buah.

Hasil Penelitian

Pemahaman Toleransi dan Perilaku terhadap Perbedaan Agama

1. Makna toleransi beragama

Toleransi beragama sebelum terjadi konflik masyarakat Poso berlandaskan pada falsafah *Sintuwu Maroso*. Falsafah ini mengandung dua makna, yaitu *Sintuwu* yang berarti bersatu atau persatuan, sedangkan *Maroso* berarti kuat sehingga apabila digabungkan berarti persatuan yang kuat (<http://ellandobe.blogspot.co.id/2010/05/sintuwu-maroso-sebagai-nilai-kearifan.html>, 10 Mei 2010). Falsafah kehidupan masyarakat Poso menegaskan selalu ingin hidup damai, poin itu yang selalu diangkat untuk meluruskan dan mendamaikan. Masyarakat Poso dulu selalu berusaha untuk saling kunjung-mengunjungi, walaupun ada ketakutan karena provokasi begitu kuat, tapi semua pihak berusaha untuk membuktikan kedamaian (Wawancara dengan Lies Sigilipu S, 28 Maret 2015).

Setelah kejadian konflik Poso, umat Islam Poso takut datang ke Tentena, meskipun umat Kristen selalu berusaha untuk memberikan peluang agar mereka datang, bahkan diadakan kegiatan olah raga dan sarasehan agar saling berbicara. Begitu juga umat Kristen Tentena merasa takut datang ke Poso, namun umat Islam selalu menjamin rasa aman disertai keterbukaan yang terus-menerus dari semua pihak.

Uniknya, di Kabupaten Poso orang bila mau pesta pernikahan tidak perlu banyak modal, masyarakat saling gotong-

royong membantu, begitu juga dalam hal duka cita dan bangun rumah. Sebagai contoh, budaya gotong-royong yang terstruktur dalam urusan persawahan, yang diistilah dengan *misale*. Bila ada empat orang anggota masyarakat, hari ini mereka bekerja di tempat si A, besoknya bergantian bersama-sama di tempat si B, besok lusa begitu lagi ke tempat yang lain, dan seterusnya. Hal ini sudah menjadi kesepakatan yang sudah terjadwal dan tertata, bahkan kerjanya tidak semerawut. Walaupun budaya ini mengalami pergeseran karena pemberlakuan sistem buruh di Poso (Wawancara dengan Rinaldy Damanik, 28 Maret 2015).

Toleransi beragama dan pergaulan umat sebelum dan pasca konflik Poso sangat baik. Pada hari raya Natal, pemuda Islam berjaga-jaga di daerah yang agak jauh dari kota Poso. Pemuda Anshor, Muhammadiyah, Al-Khairat menawarkan diri kepada pihak Kristen (bila diijinkan) untuk membantu menjaga keamanan hari raya Natal. Begitu juga sebaliknya dari pihak Islam, terutama masjid-masjid terpencil, pihak Kristen selalu berpartisipasi saat pengamanan bulan puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha (Wawancara dengan Gani T. Israil, 26 Maret 2015).

Penghormatan atau penghargaan terhadap umat agama lain juga berlaku pada umat Hindu Bali di sana. Dalam konsep Hindu Bali ada istilah *Tat Twam Asi* artinya "aku adalah engkau dan engkau adalah aku". Ajaran Hindu meyakini bahwa setiap ciptaan Tuhan, termasuk manusia dan tumbuh-tumbuhan ada ruh yang menghidupi kekuatan di balik itu yakni kekuatan Tuhan. Secara otomatis siapapun dia di sana pasti ada Tuhan, berarti wajib siapapun dia tanpa membedakan agama harus menghormati karena ada Tuhan. Bila kita tidak menghormati manusia, tumbuhan dan lain-lain, secara otomatis kita tidak bisa

harmonis dengan Tuhan (Wawancara dengan Karman, 26 Maret 2015).

Dalam agama Hindu ada tiga konsep untuk mendapatkan keharmonisan, yaitu: *Pertama*, bagaimana kita membangun harmoni dengan Tuhan, yang disebut dengan istilah *Parahiyangan* (membangun hubungan harmonis manusia dengan Tuhan); *Kedua*, membangun hubungan harmonis manusia dengan manusia itu sendiri; kemudian *Ketiga*, membangun hubungan harmonis manusia dengan lingkungannya sendiri.

2. Bentuk-bentuk toleransi beragama

Bentuk penerimaan atau toleransi terhadap agama lain selalu ditanamkan pada umat Kristen, begitu juga saat umat Islam beribadah, termasuk takbiran malam lebaran di jalan-jalan dan ibadah keagamaan lainnya. Umat Kristen terkadang sebagai penonton, bahkan ada juga yang membantu persiapan dan pelaksanaannya. Hal ini sepertinya tidak ada lagi sejak terjadi konflik 1998. Saat Hari Raya Natal tahun 2014 teman-teman Islam membantu melakukan pengamanan di sekitar gereja, yang dikoordinir dengan baik. Begitu pula terhadap umat Hindu saat melakukan Karnaval Ogoh-ogoh peringatan Hari Nyepi di Poso Pesisir (Wawancara dengan Desmon Kantjai, 25 Maret 2015).

Dulu diceritakan bahwa Raja Poso (Raja Talase) berbicara kepada kaum pendatang awal dari Bugis, Gorontalo dan lainnya, "Kami tidak pernah pagari laut ini untuk orang luar, tapi kami juga tidak ingin yang datang berlaku sewenang-wenang kepada kami di Poso". Budaya yang dibangun Raja Talase berlaku untuk semua orang. Bila datang untuk kebersamaan silakan dan tanah Poso terbuka, namun bila datang untuk berbuat tidak baik silakan keluar baik-baik.

Keturunan yang ada di Poso memegang hal itu supaya jangan tertutup, tetapi di harapkan yang datang mengerti bahwa kehidupan umat Poso ini sudah tenteram, jangan dirusak lagi. Hal itu selalu diwujudkan dalam menghadapi gangguan keamanan "Permista" dari tahun 1950 hingga awal 1960-an, di mana masyarakat sepakat mengusir keluar gerombolan dari wilayah Poso. Berikutnya, tanah Poso ini bisa tenteram lagi hingga mengalami konflik tahun 1998 berturut-turut.

3. Hubungan komunikasi antarumat beragama

Secara horisontal maupun vertikal hubungan antar umat beragama juga baik. Pada aspek politik ada satu contoh, periode 2008-2013 sejumlah 30 anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Poso terdiri dari Kristen 19 orang dan Islam 11 orang. Tahun 2014-2019 anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Poso sebanyak 30 orang terdiri dari Kristen 14 orang, Islam 14 orang, dan Hindu 2 orang. Jadi, bisa dibayangkan pasti ada umat Kristen pilih orang beragama Islam, begitu juga sebaliknya, demikian juga yang beragama Hindu.

Di tingkat tokoh maupun akar rumput saling kunjung-mengunjungi, bantu-membantu tidak ada hal-hal yang diragukan. Bila ada yang berbeda ketika dialog, berdiskusi atau berdebat, selanjutnya dalam penyampaian di akar rumput selalu memberitahu kepada tokoh umat bahwa hal-hal yang sangat prinsip, seperti masalah ideologi, jangan sampai diungkapkan kepada masyarakat. Bila sudah dicoba di tingkat pimpinan umat, harus hati-hati dalam diskusi masalah keyakinan, di situlah biasanya perdebatan sangat tajam.

4. Kerjasama antarumat beragama

Pada aspek ekonomi, budaya, dan politik tidak memandang agama tertentu. Kerjasama kegiatan sehari-hari seperti jual beli tidak ada pembatasan. Orang Islam bertransaksi dengan orang Kristen, begitu juga sebaliknya. Tidak ada hal-hal yang spesifik untuk ditonjolkan, kecuali dalam acara-acara budaya khusus kadang-kadang ada simbol yang ditonjolkan. Keterlibatan umat beragama pada kepanitiaan tertentu di Kecamatan umumnya dilibatkan semua.

5. Batasan toleransi beragama

Batasan yang perlu dihormati bagi umat Islam adalah makanan daging babi, ini sensitif tidak boleh bercampur-baur dengan makanan lainnya. Bahkan, yang memasak tidak boleh sembarang orang. Dipahami dari sisi ajaran agama hal ini harus dihormati, jangan sampai memaksa. Kemudian, kegiatan-kegiatan keagamaan yang berada di wilayah dominan agama lain, tentu berbeda dengan di tempatnya sendiri, begitu juga menyangkut hal-hal teknis dengan segala macam pengaturannya.

6. Perlakuan diskriminatif

Di Poso secara umum tidak ada perlakuan diskriminasi. Kalaupun ada, pernah terjadi pada umat Hindu yang setiap tahun melakukan acara Melasti pergi ke laut sebelum Nyepi. Umat Hindu setempat pernah dilarang tidak boleh melakukan persembahyangan di laut, karena pertimbangan (di antaranya) pemeluknya yang sedikit juga alasan lainnya. Sudah dikomunikasi dengan pemerintah, tapi pemerintah sampai saat ini belum pernah menyelesaikan masalah itu. Akhirnya, umat Hindu menyesuaikan diri tidak mesti ke laut, cukup di kuala, di sungai, atau di Pura saja (Karman, 26 Maret 2015).

Tujuan Melasti adalah untuk memohon atau menyucikan diri kita dan alam semesta dalam diri kita secara simbolis ke laut. Sempat beberapa kali dilaksanakan, namun ada pihak yang tidak membolehkan pantai di sekitar masyarakat dipergunakan untuk acara ritual keagamaan Hindu. Padahal, sebelum pelaksanaan itu sudah dapat izin dari Ketua RT, Kepala Desa, Kapolsek, Camat. Sebenarnya umat Hindu merasa kecewa atas perlakuan itu, karena sebagai warga negara yang diayomi pemerintah berhak melakukannya di mana saja, tetapi ternyata ada solusi yang masih dibenarkan ajaran agama.

Bentuk-Bentuk Toleransi Antarumat Beragama

1. Penyiaran agama

Penyiaran agama secara terbuka boleh dikatakan tidak pernah terdengar lagi, kecuali secara sembunyi-sembunyi (*door to door*), sementara di kalangan Kristen diakui dilakukan kelompok Saksi Yehuwa. Menurut informan, pertama kali menangani Saksi Yehuwa waktu diadakan percakapan terbuka dengan mereka. Di Poso tidak ada ruang lagi buat Saksi Yehuwa jalan kesana-kemari memasuki anggota jemaat gereja lainnya (Desmon Kantjai, 25 Maret 2015).

Terkait penyiaran agama sudah pasti ada hal-hal yang sensitif, namun dengan seringnya pertemuan antar tokoh dan pemimpin agama, ada kesepakatan yang tidak tertulis bahwa yang harus kita sampaikan adalah sesuatu yang membawa kedamaian. Terbukti tidak terjadi gesekan yang keras di masyarakat setelahnya. Setiap agama diakui menginginkan umatnya lebih banyak, namun disepakati bukan soal jumlah melainkan umat yang berkualitas yang lebih penting (Rinaldy Damanik, 28 Maret 2015).

Pihak Kristen aktif menyiarkan agama sesuai dengan akidah mereka, tidak saling menyinggung, begitu pula pihak Islam. Pimpinan MUI Poso seringkali mengirim Naskah Buletin Jum'at dan hari-hari besar keagamaan Islam, yang berisi pesan persaudaraan. Selebaran itu disebut dengan "Pemonas Bersaudara" (Gani T. Israil, 26 Maret 2015).

Pada dasarnya penyiaran agama itu mengajak orang ke arah yang lebih baik. Tapi, kadang ada yang keras, kalem atau ada juga yang biasa saja. Misalnya, bagi muslim upacara menyembah patung itu tidak boleh, namun karena dalam Hindu itu bagian dari ajarannya, maka hal itu tidak pernah dipermasalahkan. Ada konsep dalam ajaran Hindu dengan istilah *Mulat Sarira* (mawas diri), yang artinya melihat diri ke dalam, apapun yang dikatakan oleh orang lain, harus bangga dengan agamanya sendiri. (Karman, 26 Maret 2015)

2. Pendirian rumah ibadah

Terkadang ditemukan pihak-pihak yang keberatan terkait pendirian rumah ibadah, terutama di kalangan masyarakat bawah. Kadang mereka memaksa sesama umat Kristen, di kalangan jemaat sering memanas terkait jemaat Saksi Yehuwa yang ingin mendirikan rumah ibadat, biasanya istilah mereka Balai Kerajaan. Hal semacam itu terjadi di internal Kristen, sebab begitu banyak denominasi di dalamnya, seperti Pantekosta dan sejenisnya. Di Poso rumah ibadah berdiri secara alami sesuai kebutuhannya dan tidak dipersoalkan oleh masyarakat dalam arti positif. Ada bangunan masjid besar di Tentena, padahal umatnya relative sedikit (Rinaldy Damanik, 28 Maret 2015).

Terkait pendirian rumah ibadah sudah diberlakukan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) No. 9 dan 8 tahun 2006

dan terlaksana dengan baik di Poso, karena telah terpenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya. Dulu pernah ada umat Kristen satu hingga dua keluarga membangun gereja, tapi sekarang tidak ada lagi. Selama ini mereka selalu menghubungi Forum Kerukunan Umat Beragama dan Kementerian Agama untuk meminta petunjuk (Gani T. Israil, 26 Maret 2015).

Terkait pendirian Pura sampai saat ini tidak ada masalah, dengan komunikasi yang baik. Sudah ada pemahaman masyarakat agama lain bahwa setiap agama memiliki rumah ibadah masing-masing, walaupun terkadang ada kemauan kelompok tertentu yang keberatan. Misalnya, orang Hindu yang berencana mendirikan Pura di tepi pantai untuk tempat *Melasti*, mendapat penolakan masyarakat setempat, mereka menyesuaikan diri dan tidak kaku.

3. Perayaan hari besar keagamaan

Budaya saling menghormati, saling menghargai, kunjung-mengunjungi sudah sangat lama dan terjadi di masyarakat Poso. Bila ada hari raya Natal atau upacara keagamaan lainnya, umat Islam, Hindu dan lainnya datang, begitu juga sebaliknya. Acara-acara kekeluargaan, seperti pengucapan syukur (*Padungku*) di kampung-kampung Islam, umat lainnya datang. Itu yang mereka tumbuh kembangkan kembali (Desmon Kantjai, 25 Maret 2015).

Kalangan tokoh agama tidak jenuh-jenuhnya berupaya meningkatkan toleransi, walaupun seringkali mereka berperan semacam pemadam kebakaran. Bila terjadi konflik, tokoh agama lagi yang diminta menyelesaikan. Itu sudah menjadi panggilan tugas mereka semua, apalagi bila sungguh-sungguh memerankan diri sebagai tokoh umat.

4. Perkawinan beda agama

Harmonisasi antarumat beragama di Poso salah satu pengikatnya adalah kawin-mawin. Kadang terjadi kawin-mawin atas nama keinginan pribadi anak muda dan sama keluarganya, orangtua dan saudara-saudaranya. Bila terjadi respon yang agak keras masing-masing pihak, baik dari Islam maupun Kristen, terkadang orangtua mengalah karena yang bersangkutan sudah saling suka (*bakusuka*). Dia sudah bisa menentukan sendiri urusan kawinnya, walaupun terkadang menjadi tegang sebab tidak mudah menyelesaikannya.

Anak seorang tokoh Islam kawin dengan seorang anak Kristen misalnya, untuk mengakhiri ketegangan dilakukan beberapa tahap percakapan dan didudukkan masalahnya. Kadang dibantu oleh aparat pemerintah daerah untuk menengahnya. Ada kesepakatan yang baik terutama terkait dengan kedua anak ini, diusahakan tidak ada ketegangan antara keduanya, masih banyak yang berpikiran seperti itu.

Pernikahan adat adalah salah satu solusinya, karena pernikahan adat tidak pakai agama. Bagi yang terlanjur hamil, hukum adat mmeberikan sanksi untuk memenuhi sejenis pembayaran atau denda tertentu, apakah mereka menikah atau tidak yang penting diurus. Tapi, pada umumnya mereka dinikahkan sebagai tanggung jawab.

5. Pendidikan agama

Pengaruh tingkat pendidikan keagamaan sebelum konflik ada tahapan-tahapan. Pendidikan pasti mendukung toleransi, semakin tinggi pendidikan biasanya toleransinya juga lebih baik. Ada pendidikan agama di beberapa sekolah yang beragama lain di Tentena, tapi ini tanggung jawab pemerintah.

Walaupun GKST punya yayasan Kristen, di situ ada murid yang beragama Islam, namun tergantung distribusi dari pemerintah untuk guru agama setempat. Tenaga guru selalu diusulkan bahwa sekecil apapun jumlah murid di sekolah yang beragama tertentu harus diberi perhatian khusus, tidak bisa dipaksa untuk mengikuti ajaran agama lain.

6. Bantuan luar negeri

Bantuan luar berupa sembako, obat-obatan, dan sebagainya diakui ada apalagi pernah terjadi konflik. Uniknya, ada lembaga dari luar negeri sekitar tahun 2000-an yang kecewa ketika membagi beras bantuannya pada agama lain, ini yang harus diwaspadai. Ada lembaga bantuan luar negeri yang mereka salurkan sendiri, ada juga lembaga bantuan luar negeri yang maunya hanya untuk Kristen. waktu itu, jika ada lembaga bantuan luar negeri yang tidak senang diminta mengambil kembali bantuannya, karena tidak mungkin dipecah-pecah seperti itu (Rinaldy Damanik, 28 Maret 2015).

Namun, ada lembaga-lembaga bantuan luar negeri yang bagus dan harus dicermati, hubungan seperti ini selalu ada. Gereja Sinode GKST hingga sekarang selalu mencermati agar menerima bantuan harus seperti yang diistilahkan dalam bahasa agama bahwa Tuhan saja memberikan sinar matahari dan hujan yang sama kepada makhluknya.

7. Perawatan dan pemakaman jenazah

Pemakaman yang ada di Poso sejak dulu secara natural masing-masing daerah memiliki pemakaman agamanya. Ada kuburan Islam, kuburan Kristen dan agama lainnya, namun tidak ada masalah. Dalam hal pelaksanaan pemakaman, masyarakat saling memberi perhatian, campur baur memberikan rasa duka cita, dan saling tolong-menolong.

8. Penodaan agama

Penodaan agama tidak pernah ada lagi. Dulu pernah terjadi jauh sebelum konflik, seorang penganut muslim yang bernama Rusli Manuwarfa masuk Kristen dan sekolah teologi di Manado, kemudian pulang ke Poso bicara macam-macam tentang ajaran muslim akhirnya diproses secara hukum.

9. Pengasuhan anak

Ada panti asuhan dan keluarga yang mengambil alih anak orang lain kemudian diasuh, tapi belum pernah terdengar masalah agama. Mungkin saja ada karena tidak diceritakan dan dipublikasikan, namun sudah dipahami soal anak-anak seperti itu. Ada juga pengasuhan anak beberapa keluarga yang masih hubungan keluarga yang berbeda agama tidak masalah, walaupun kemudian ada terjadi perubahan atau peralihan agama.

Faktor yang Mendasari Toleransi Beragama

1. Budaya

Dasar hukum masyarakat bisa toleran karena budaya, antara lain: *Pertama*, budaya sudah lama mentradisi di kalangan masyarakat; *Kedua*, peran tokoh-tokoh umat serta pemerintah Poso di berbagai tempat yang terus betul-betul mempersatukan umat. Pemerintah daerah, khususnya Bupati Poso dan pejabatnya, betul-betul menunjukkan peran yang positif di tengah-tengah umat beragama. Mereka tampil tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya. Begitu pula peran pejabat Kemenag selalu tampil dengan baik, sehingga umat merasa terayomi.

2. Nilai-nilai agama

Aliran atau denominasi dalam ajaran Kristen sudah masuk pada prinsip iman seseorang. Ajaran Kristen mengajarkan untuk taat pada Tuhan Yesus serta hidup saling mengasihi dan menghormati terhadap yang lainnya, yang selalu ditanamkan kepada siapapun. Sebagai ciptaan Tuhan, kita diperintahkan untuk saling menghormati, menghargai, membantu satu sama lain. Tidak membiarkan setiap umat mengalami kesusahan.

Nilai-nilai toleransi juga terdapat pada agama Hindu, seperti *Wasudewa Kutumbakam* yang berarti “kita semua bersaudara”, kearifan masyarakat Poso dengan falsafah *Sintuwu Maroso*, orang Bali dengan konsep “*Menyama Braya*” dalam hal kesepakatan sosial dan konsensus bersama, dengan ketentuan masing-masing beragama.

3. Peraturan daerah

Harmoni yang terjalin di Poso berdasarkan kerekatan umat beragama, namun tidak merujuk dalam berbagai aturan pemerintah daerah. Yang pasti pemerintah daerah Poso merujuk pada PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Dulu pemerintah daerah kuat sekali kerinduannya untuk mengikat umat ini, sehingga tidak ada perbedaan satu dengan yang lain.

Contoh kongkrit program pemerintah daerah Poso di antaranya: Safari Ramadhan dan Safari Natal setiap tahun yang tidak dilewatkan, dilakukan dengan cara kunjung-mengunjungi per-Kecamatan dengan mengikutsertakan umat beragama yang lain. Pada acara Safari Natal, Camatnya yang beragama Islam menjadi tuan rumah sekaligus ketua panitianya. Saat dikunjungi, dia yang menunjukkan dan menentukan di mana gerejanya, yang dilibatkan bukan pada ritual ibadahnya.

Kasus konflik yang pernah terjadi dan faktor penyebabnya

Kejadian konflik pertama pada tahun 1998 ada tiga momen, yaitu: *Pertama*, suksesi Bupati Poso; *Kedua*, bersamaan dengan itu ada penegakan hukum Koperasi Usaha Tani (KUT) yang melibatkan beberapa tokoh yang akan diproses secara hukum; *Ketiga*, saat itu bulan Ramadhan bersamaan dengan perayaan Natal.

Momen ketiga inilah yang dipakai, mulai muncul selebaran yang menghujat sebelum kejadian. Sebelumnya sudah biasa ada pawai Natal, saat itu ketika pawai Natal terjadi pelemparan. Ada kejadian sebenarnya yang cukup memicu konflik, yaitu perkelahian dua orang anak muda mabuk berbeda agama. Muncullah isu bahwa pembunuhan terjadi di masjid, diperkuat dengan isu segala macam.

Tahun 1998 terjadi konflik pembakaran rumah, waktu itu orang berkelahi masih pakai senjata tradisional, seperti parang, tombak, pisau, batu dan lainnya. Tahun 1998 masih bisa diatasi dan belum ada pengungsian. Tahun 1999 akibat konflik itu mengalirlah bantuan dari Jepang yang nilainya waktu kira-kira 3 miliar rupiah yang dipergunakan untuk membangun kembali rumah penduduk.

Tahun 1999 sudah ada pertemuan, orang kembali ke Poso secara baik. Ternyata bulan April 2000 meledak kembali kerusakan, lagi-lagi dipicu perkelahian dua anak muda. Saat itu ada dua momen penting, yaitu suksesi pergantian Sekretaris Daerah Poso, yang bersamaan dengan momen penegakan hukum yaitu bantuan Jepang tahun 1999 yang tidak pernah disalurkan ke masyarakat dan lagi diproses. Selain itu, momen peringatan Paskah umat Kristen dan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Tingkat Nasional di Ibu Kota Provinsi Palu. Jalur lintas Poso jadi jalur kafilah yang dilewati.

Yang aneh pada tahun 2000 itu, beredar selebaran saling menghujat di jalan-jalan, juga selebaran tentang cara membuat senjata rakitan. Siapa saja bisa bikin senjata rakitan di bengkel-bengkel, sehingga konflik waktu itu sudah pakai senjata. Yang tidak bisa dibuat adalah amunisi, sehingga terjadi perdagangan amunisi. Sasarannya tidak peduli agama apa saja yang penting pihak tertentu diuntungkan.

Setelah itu beredar lagi bisnis senjata otomatis asli, inilah yang makin mengacaukan situasi konflik yang berkepanjangan, siapa sebenarnya yang berkepentingan di situ. Saat itu kondisi sudah jelas saling menyerang, faktor ekonomi menonjol dengan terjadinya penjarahan di mana-mana, termasuk di Tentena, Poso Pesisir, dan Kota Poso.

Yang disukai dan tidak disukai oleh kelompok umat beragama

Yang disukai di antara umat beragama dalam kebersamaan di antaranya adalah acara yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti acara perkawinan dan syukuran. Yang tidak disukai di antaranya ada pertentangan tentang minuman keras. Umat Islam mengharamkan, sementara umat Kristen hanya memberi pembatasan, kadang ini yang menjadi benturan.

Kebolehan minuman keras bagi umat Kristen, itu juga berpedoman pada ajaran Tuhan (Alkitab) yang tidak sama sekali mengharamkan, tapi hanya mengingatkan agar tidak berlebihan. Seperti yang umum diajarkan, anggur itu untuk menghangatkan tubuh, cukup sampai di situ. Kadang ego manusia berlebihan dan tidak bisa dihindari, seperti minum-minuman "sagu" dari pohon Nira, kebiasaan nenek moyang mereka yang pohonnya tumbuh sendiri. Dahulu sagu merupakan minuman orang tua, sebagai penghangat makan pagi,

siang dan malam, yang menurun dari generasi ke generasi.

Budaya "Tarian Dero", sebuah budaya asli Poso, di mana semua laki-laki dan perempuan pegangan tangan. Biasanya diadakan saat upacara syukuran, seperti mantin, pesta ulang tahun, pesta adat, pesta panin, dan sebagainya. Umat Islam tidak boleh mengikuti Tarian Dero, di sini kadang terjadi benturan. Anak muda bila tidak ada acara Tarian Dero bakalan tidak mau datang, karena kegembiraan mereka sambil menyanyi, menari mengungkapkan rasa kegembiraan bersama, bila sudah lelah baru berhenti. Orang Islam ada juga yang mengikuti sesuai dengan kesukaan masing-masing.

Memelihara anjing dimaklumi umat Kristen untuk penjagaan rumah, sementara di lingkungan Islam tidak seperti itu. Warga di Ampana wilayah pegunungan memelihara anjing guna menjaga kebunnya. Cara mereka memelihara itu sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga kebun mereka biar lebih aman.

Terkait stereotip kesukuan dapat berpengaruh ke agama. Para pendatang dari Bugis, Gorontalo, dan Padang yang beragama Islam seolah-olah sama semua dianggap yang bikin kacau datang ke Poso. Begitu juga sebaliknya, umat Kristen pasti orang Manado, Toraja atau Batak dianggap pekerja keras segala macam.

Aktor pendorong toleransi dan intoleransi beragama

Aktor toleransi beragama

Aktor atau tokoh toleransi beragama ambil bagian semua, tidak ada semacam tokoh sentral yang menonjol. Semua pihak punya sumbangan dan proaktif. Keterlibatan banyak orang semakin lebih bagus, panduannya sudah

jelas, diharapkan semua pihak aktif. Kepimpinan Kristen juga menganut prinsip bersama (*kolegial*), di tingkat Sinode semua harus mengambil bagian. Aktor toleransi beragama dirasakan relatif banyak dan selalu ada. Tokoh-tokoh toleransi beragama semua diambil dari perdamaian Malino. (Lies Sigilipu S, 28 Maret 2015).

Raja Talase, aktor toleransi beragama dahulu yang populer namanya sempat membuat maklumat tertulis dalam bahasa Poso tapi luar biasa. Dia menyebut nama-nama bangsa-bangsa, bahwa "laut tidak dipagari, langit tidak ditutup, semua bisa masuk asal kita hidup damai", baik orang Arab, Bugis, Cina, Gorontalo, Bali atau siapa saja bisa masuk di Poso yang penting bisa hidup damai di Poso.

Yang patut dicatat, Raja Talase waktu itu belum beragama, artinya belum ada pengaruh yang kuat dari agama, tapi beliau itu sudah punya sikap seperti itu. Maklumatnya bukan dilandasi agama, tetapi berperspektif sosiologis, walaupun Raja Talase tidak memahami apa itu sosiologi. Untuk bahasa kita sekarang, itu bisa dianggap maklumat sosiologis.

Aktor toleransi beragama yang banyak kontribusinya membangun Poso adalah Abdul Malik Syahdat (almarhum), Wakil Bupati Poso periode 2005-2009. Beliau sangat nasionalis sekali ketika terjadi konflik. Setelahnya, menyusul salah seorang pengurus FKUB Poso Pdt. Desmon Kantjai. Di pihak pemerintah, di antaranya Piet Inkiriwang (Bupati Poso sekarang), T. Syamsuri (Wakil Bupati Poso), dan Syahrul Panjili (Sekretaris Daerah Kabupaten Poso). Semua aktor toleransi itu bila ada masalah selalu turun memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Aktor intoleransi beragama

Di kalangan Kristen, diakui ada kelompok-kelompok yang ekstrem (radikal. Dia bukan teror secara fisik tapi secara fikiran. Khutbahnya di mana-mana mengatakan bahwa di masyarakat ada jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, kafir dan seterusnya, ada aliran atau kelompok tertentu yang muncul, ini sering kali bisa membuat resah. Para tokoh toleransi coba memberikan pemahaman kepada jemaat bahwa ini bukan soal agama lagi. Kalau saling menghujat agama lain itu termasuk penodaan agama yang telah diatur pada Undang-undang PNPS No. 1 tahun 1969 dan hukumannya berat, sehingga orang itu berhenti untuk melakukannya.

Peningkatan toleransi beragama

Upaya peningkatan toleransi

Upaya yang perlu dipertahankan untuk toleransi beragama adalah dengan memperkuat kehidupan umat beragama. Sekarang sudah menjadi isu nasional bahwa gangguan yang terjadi bertitik tolak dari pemahaman umat, karena beragama dan berkeyakinan masyarakat belum terlalu kuat. Masing-masing keluarga harus menjaga dan tidak boleh mengabaikan untuk memperkuat pemahaman agama yang benar. Beragama yang benar itu tidak egois dan mementingkan dirinya-sendiri. Bahwa ada umat yang lain yang sama nilainya, harus hormati, dikasihi, dan kalau perlu harus berbagi.

Memelihara, meningkatkan dan menjaga toleransi beragama ke depan, mulai dari pendidikan keluarga, pendidikan perdamaian, toleransi, karakter dan pendidikan agama yang benar adalah hal yang sangat penting. Peran guru-guru agama sangat penting, mereka harus disiapkan agar betul-betul paham mengenai agama. Karena sesungguhnya apa yang dibicarakan

semua agama menginginkan perdamaian (Lies Sigilipu S, 28 Maret 2015).

Penyebaran faham agama yang keliru, seperti “semua orang kafir harus dibunuh” di Islam dan “jangan bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama” di Kristen merupakan pemicu sikap intoleransi. Aliran-aliran tertentu banyak yang fanatik dan tidak suka bergaul dan curiga dengan orang lain, seperti penafsiran “pergilah kamu jadikan semua bangsa murid-Ku”, “murid-Ku adalah murid orang Kristen”, “Mereka penafsirannya semua harus di Kristenkan”. Mereka bisa sangat frontal dalam penyebaran agama, artinya tidak peduli dengan orang-orang yang beragama, padahal mereka orang yang beragama.

Di Universitas Kristen Tentena, ada mata kuliah pendidikan perdamaian, yang materinya antara lain: *Pertama*, perdamaian dilihat dari sejarah agama; *Kedua*, teori konflik yang menjelaskan apa faktor konflik, terutama yang menyebabkan anarkis. Konflik secara konstruktif sudah ada di dalam buku literature; *Ketiga*, bagaimana membangun perdamaian.

Di sini diceritakan sejarah kelam Poso, sehingga bisa difahami betapa pentingnya membangun perdamaian. Ini perlu agar anak-anak muda yang dulu ketika konflik Poso masih kecil, mereka tahu tentang ide agar Poso tetap damai.

Inisiator peningkatan toleransi

Inisiatif yang perlu dikembangkan adalah peningkatan peranan tokoh umat, meekalh yang berada di garda depan menghadapi umat. Mereka

masih dipercaya umat. Dsalam hal ini, pemerintah punya kewenangan jalur khusus, sedangkan tokoh agama betul-betul berdiri pada jalur netral (Desmon Kantjai, 25 Maret 2015).

Kesimpulan

1. Raja Talase berperan penting dalam penciptaan toleransi beragama di Poso, bahkan dianggap sebagai aktor toleransi beragama zaman dulu. Beliau pernah membuat maklumat tertulis dalam bahasa Poso, “Laut tidak dipagari, langit tidak ditutup, semua bisa masuk asal kita hidup damai”;
2. Bentuk toleransi di Poso juga dikuatkan budaya yang sudah berjalan di masyarakat untuk tidak ada saling mengganggu dalam bertetangga di lingkungan. Ini didukung dengan falsafah *Sintuwu Maroso* yang berarti persatuan yang kuat;
3. Konflik pada tahun 1998 dilatari oleh tiga momen, yaitu: *Pertama*, suksesi Bupati Poso; *Kedua*, proses penegakkan hukum Koperasi Usaha Tani (KUT) yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat; dan *Ketiga*, momen bulan Ramadhan yang bersamaan dengan perayaan Natal;
4. Secara umum faktor-faktor yang mendasari toleransi beragama, antara lain: a) Dasar hukum masyarakat dan budaya yang mendorong kerukunan; b) Aliran atau denominasi yang sudah masuk pada prinsip keimanan seseorang; dan c) Kerekatan umat beragama, apalagi didukung dengan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006.

Daftar Pustaka

- _____, *Kabupaten Poso Dalam Angka 2010*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Poso 2010.
- Anis Faranita Dhanik Rachmawati, 2006, *Toleransi Antar Umat Islam dan Katolik: Studi Kasus di Dukuh Kasaran, Desa Pasungan, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten (Skripsi)*, Semarang, IAIN Walisongo.
- Bogdan dan Taylor, Steven J., (Terj.) Arif Furkhan, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Surabaya, Usaha Nasional.
- Fathurrahman, 2008, *Toleransi Beragama Antara Penyedia dan Pengguna Jasa Kos-kosan Beda Agama di Dusun Papringan, Desa Catur Tunggal, Depok, Sleman, Skripsi*, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga.
- Horton, B., Paul dan Hunt, Chester, L., (dalam) Aminuddin, Ram & Sobari, Tita, (Alih Bhs.), 1999, *Sosiologi, Jld.2*, Jakarta, Eriangga, Edisi VI.
- Muhammad Hisyam. (Ed.), 2006, *Budaya Kewargaan Komunitas Islam di Daerah Rentan Konflik*, Jakarta, LIPI.
- Nurlaela Ndobe, *Sintuwu Maroso Sebagai Nilai Kearifan Lokal dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Poso*, <http://ellandobe.blogspot.co.id/2010/05/sintuwu-maroso-sebagai-nilai-kearifan.html>, 10 Mei 2010.
- Saiful Mujani, 2007, *Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- Tahmidy Lasahido, dkk., *Suara Dari Poso Kerusuhan, Konflik dan Resolusi, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA)*, Jakarta Timur, 2003.
- Teguh Setiawan, 2007, *Toleransi Beragama di Kalangan Komunitas Slankers Semarang: Studi Kasus Organisasi Basis Slankers Club.* (Skripsi), Semarang, IAIN Walisongo.
- Tim Peneliti, 2006, *Survei Opini Publik: Toleransi Sosial Masyarakat Indonesia*, Jakarta: LSI.
- Tim Peneliti, *Toleransi Beragama di Daerah Rawan Konflik*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, tahun 2015.